



Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru

Tria Susiawati, Dadang Mashur

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2418>

*Correspondence: Tria Susiawati

Email:

tria.susiawati@student.unri.ac.id

Received: 28-04-2025

Accepted: 15-05-2025

Published: 06-06-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstrak: Kebijakan Kota Layak Anak (KLA) merupakan salah satu upaya dalam memenuhi hak-hak anak serta memberikan perlindungan pada anak di suatu kota/kabupaten dengan harapan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Kota Pekanbaru telah mengadopsi program Kota Layak Anak (KLA) dan mendapatkan penghargaan tingkat Nindya. Namun, permasalahan anak masih terus meningkat setiap tahunnya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) dan mengidentifikasi dan menganalisis faktor penghambat *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori dari Schottle, Haghsheeno dan Genhbauer dalam Astuti dkk (2020). Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya optimal karena kurangnya koordinasi dalam kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Pekanbaru melalui DP3APM dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam program Kota Layak Anak (KLA).

Kata Kunci: *Collaborative Governance*, Penyelenggaraan, KLA

Pendahuluan

Kota Layak Anak atau disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak untuk anak melalui pengintegrasian komitmen sumber daya pemerintah, swasta, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan anak. Timbulnya berbagai macam tindakan permasalahan terhadap anak menjadi persoalan yang sangat serius. Berbagai macam permasalahan terjadi tidak terlepas dari minimnya sinergi antara berbagai pihak yang terkait. Permasalahan anak tidak dapat dilakukan oleh satu kelembagaan saja, akan tetapi memerlukan peran kontribusi masyarakat, dunia bisnis, keluarga, dan anak itu sendiri. Penyelenggaraan KLA merupakan jawaban untuk terbentuknya kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait (Irwan et al., 2022). Melihat kebijakan tersebut maka setiap daerah berperan dalam mewujudkan percepatan program KLA. Salah satunya dengan menyiapkan kebijakan yang melindungi tentang pemenuhan hak-hak anak. Melalui Konvensi Hak-hak Anak (KHA) dapat diketahui bahwa pembangunan sebuah Dunia Layak Anak merupakan komitmen

global yang melibatkan banyak negara termasuk negara berkembang seperti Indonesia. Pelaksanaan KHA di Indonesia diterjemahkan dalam kebijakan kabupaten/kota layak anak. Setelah mengadakan persiapan dan mengukuhkan institusi, Indonesia berupaya memulai landasan untuk menyelenggarakan program kabupaten/kota layak anak (KLA).

Provinsi Riau terutama Kota Pekanbaru sudah mulai menjalankan kebijakan mengenai Kota Layak Anak (KLA). Menurut undang-undang nomor 23 tahun 2003 yang sudah di verifikasi ke dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjelaskan bahwasannya anak adalah seseorang yang berusia dibawah 18 tahun termasuk anak yang didalam kandungan, menurut *konvensi hak anak*, anak adalah setiap yang berusia dibawah 18 tahun, kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Komitmen Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengembangkan Kota Layak Anak melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Walikota Pekanbaru, antara lain yaitu: Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan Walikota Kota Pekanbaru Nomor 111 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak. Peraturan Walikota Pekanbaru tersebut mengacu pada upaya program maupun kebijakan terhadap pemenuhan hak-hak anak. Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan perlindungan anak.

Tujuan KLA secara umum untuk memenuhi hak dan melindungi anak, secara khusus untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konvensi hak anak dari kerangka hukum ke dalam definisi, strategi dan intervensi pembangunan, dalam bentuk kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak (PHPA), pada suatu wilayah kabupaten/kota. Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya, hak atas lingkungan yang sehat, hak-hak perlindungan dari tindak kriminal, kekerasan, pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak. Selain itu, hal yang harus diingat dalam indikator kota yang layak untuk anak-anak adalah hak sipil dan kebebasan anak yang terdiri dari: cakupan akta kelahiran, adanya layanan informasi bagi anak di ruang publik, dan adanya forum anak. Berbicara tentang Kota Layak Anak, jika ditelusuri lebih dalam tentu Kota Layak Anak tidak hanya berfokus pada beberapa hal saja melainkan banyak hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak.

KLA memiliki kategori penghargaan Kota Layak Anak terdiri dari lima tingkatan yaitu, dimulai dari pratama, madya, nindya, utama, dan yang tertinggi Kota Layak Anak (KLA). Setiap tahun, standar evaluasi digunakan dalam menjalankan Kota Layak Anak. pada peringatan hari anak 2019 di Kota Makasar, Provinsi Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Pekanbaru menerima tiga penghargaan sekaligus sebagai Kota Layak Anak (KLA). Salah satu kriteria tersebut adalah Nindya Kota Layak Anak, Sekolah Ramah Anak, dan

Puskesmas Ramah Anak. Pada malam penganugerahan apresiasi Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2023 di Hotel Padma Semarang, Jawa Tengah, Kota Pekanbaru kembali diberikan penghargaan Provinsi Layak Anak (Provila) dengan kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) Republik Indonesia. Kinerja ini mendorong pemerintah Kota Pekanbaru untuk memprioritaskan program Kota Layak Anak (KLA) (Lubis & Zubaidah, 2022).

Pada tahun 2017 Kota Pekanbaru mendapatkan KLA pada peringkat Madya, tahun 2018 penghargaan KLA Kota Pekanbaru berada pada peringkat madya, tahun 2019 meningkat pada peringkat nindya, pada tahun 2020-2021 tidak ada penilaian dikarenakan adanya wabah covid-19 di dunia, kategorinindya bertahan hingga tahun 2023 dan target selanjutnya menuju tingkat utama. Dapat disimpulkan bahwa memang terdapat sebuah peningkatan di setiap tahunnya karena pencapaian ini, Pemerintah Kota Pekanbaru harus terus berkomitmen pada program Kota Layak Anak (KLA). Dapat dilihat bahwasannya komitmen dan peran dari aktor yang terlibat sudah dibentuk dan predikat Kota Layak Anak untuk Kota Pekanbaru telah melampaui target atau sasaran, yang artinya dalam penerapan perlindungan anak di Kota Pekanbaru harus sudah lebih baik dari tahun ketahun terutama dengan adanya penguatan kelembagaan yang direalisasikan dengan adanya perda Kota Layak Anak sehingga semakin terlihat komitmen dari pemerintah demi terwujudnya Pekanbaru sebagai Kota Layak Anak. Penguatan juga dilakukan dari sisi dunia usaha yang sudah mulai konsen dengan pemenuhan hak anak, namun meskipun mengalami kenaikan predikat KLA permasalahan anak juga ikut naik.

Kota Pekanbaru memiliki jumlah anak dengan cukup besar yaitu sebanyak 381.127 anak, hal ini tentunya menjadi perhatian utama dari pemerintah Kota Pekanbaru untuk memprioritaskan pencapaian kebijakan yang berhubungan dengan anak yaitu program Kota Layak Anak (KLA) dimana Kota Pekanbaru sudah berada di tingkat Nindya. Namun, Kota Pekanbaru masih menghadapi banyak masalah anak yang meningkat setiap tahunnya dan paling tinggi itu berada pada tahun 2023 dengan jumlah kasus tahun 2021 ada 221 kasus, tahun 2022 ada 284 kasus dan paling tertinggi pada tahun 2023 itu ada 308 kasus.

Penyelenggaraan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru, DP3APM harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan banyak OPD terkait. Koordinasi yang dilakukan harus lebih intens dengan mempertimbangkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, karena program Kota Layak Anak ini dijalankan bukan hanya tanggung jawab DP3APM tetapi banyak OPD lain yang ikut terlibat. DP3APM memang sebagai pemegang program, namun teknis lapangan banyak dilakukan oleh OPD terkait. Tata kelola kolaboratif yang melibatkan pemerintah bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan bersama dalam sebuah forum untuk mengambil keputusan bersama guna mengatasi permasalahan yang terlalu besar untuk ditangani oleh pemerintah. Namun institusi dan masyarakat secara keseluruhan juga harus memimpin dalam pengelolaan urusan publik, tidak hanya pemerintah. Selain itu, KLA dilaksanakan bersama oleh berbagai organisasi perangkat daerah (OPD), organisasi kemasyarakatan, dan kelompok bisnis.

Model pembangunan anak ini bertujuan guna mencapai keselarasan antara pendekatan pengelolaan dari atas dan dari bawah yang bergantung pada partisipasi semua pihak.

Esensi pokok dari penelitian ini adalah melalui *collaborative governance* dapat lebih efektif untuk mengembangkan Kota Layak Anak baik di Kota Pekanbaru khususnya ataupun kota-kota lain di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai awalnya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam penelitian ini penulis meneliti di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota Pekanbaru, Dinas Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dan Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian di lokasi ini karena DP3APM Kota Pekanbaru memiliki bidang pemenuhan hak anak. Bidang ini bertanggung jawab untuk mendukung pembentukan Kota Layak Anak (KLA), mendukung, berkolaborasi, dan bekerja sama dengan semua pihak yang terlibat dalam mewujudkannya, Dinas Kesehatan koordinator bidang kesehatan, Dinas Sosial koordinator bidang perlindungan khusus, Dinas Pendidikan dalam bidang pendidikan dan Dinas Pencatatan Penduduk dan Pencatatan Sipil pada bidang hak sipil dan kebebasan.

Studi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang tata kelola kolaboratif dalam melaksanakan program penelitian, seperti program Kota Layak Anak (KLA) Kota Pekanbaru. Dalam kasus ini, penulis melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendukung tulisannya. Metode purposive sampling digunakan untuk menemukan informan dalam penulisan ini.

Peneliti menggunakan jenis data yang terdiri dari dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Sugiyono (2017) mengatakan data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data ini didapatkan secara langsung dengan diadakannya wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru dan aktor lain yang terlibat untuk melanjutkan penelitian *collaborative governance* dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Murdiyanto, 2020). Penulis mendapatkan data pendukung untuk penelitian ini dari berbagai sumber, termasuk tulisan ilmiah, jurnal penelitian sebelumnya, dan dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Hardani, dkk.,

2020). Untuk mendapatkan informasi tersebut, penulis menggunakan metode observasi adalah pengumpulan data melalui pengamatan objek penelitian tertentu, baik langsung maupun tidak langsung. Esterberg (dalam Sugiyono, 2017) mendefinisikan wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, dan dalam metode dokumentasi, alat pengumpulan data disebut formulir pencatatan dokumen, dokumentasi dikumpulkan selama penulis turun ke lapangan dalam penelitian ini.

Analisis data adalah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab (Murdiyanto, 2020). Menurut Miles dan Huberman (1994) terdapat tiga jenis kegiatan dalam analisis data kualitatif, di antaranya adalah reduksi data yaitu pada tahap awal pengumpulan data, reduksi dilakukan dengan mengkodekan atau mengelompokkan poin-poin untuk membuatnya lebih mudah dipahami, selanjutnya penyajian data didefinisikan sebagai sekumpulan informasi yang disusun sehingga mungkin untuk membuat kesimpulan dan mengambil tindakan, dan terakhir kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari penelitian dengan cara menarik kesimpulan untuk fenomena yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil dan Pembahasan

Penyelenggaraan Kota Layak Anak

Kelembagaan

Kota Pekanbaru telah memiliki dasar kelembagaan yang kuat dalam pengembangan Kota Layak Anak melalui berbagai regulasi dan kegiatan yang terstruktur. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih intensif dalam mengoptimalkan peran forum anak, perusahaan, dan media dalam mendukung KLA.

Klaster I: Hak Sipil dan Kebebasan

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak melalui pemberian akta kelahiran dan KIA, serta penerapan program PATBM. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat sehingga partisipasi masyarakat dalam memenuhi kluster ini masih terbilang belum optimal.

Klaster II: Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Berdasarkan wawancara diatas, dapat diketahui bahwa puspaga menjadi lembaga penting dalam memberikan sosialisasi dan edukasi perlindungan anak sebagai tempat bertanya bagi orangtua/keluarga yang menghadapi masalah keluarga.

Klaster III: Kesehatan Dasar Dan Kesejahteraan

Pemerintah Kota Pekanbaru telah melakukan riset dan edukasi terhadap keluarga terkait gizi anak untuk mengurangi angka stunting. Namun, perlu ada evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa program-program yang sudah direncanakan dapat berjalan efektif serta masih adanya iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau seperti

rokok membuat produk tembakau terlihat normal seperti produk lainnya sehingga menghambat edukasi tentang bahaya konsumsi produk tembakau di Kota Pekanbaru.

Klaster IV: Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pelaksanaan Program Sekolah ramah anak sudah dilakukan dengan baik, dan adanya pusat kreatifitas anak bukan hanya sebagai tempat menghabiskan waktu luang, tetapi juga sebagai tempat untuk menyalurkan minat bakat yang dimiliki serta memberikan kesempatan atau panggung kepada anak untuk menampilkan yang telah dipelajari sebagai bagian untuk meningkatkan rasa percaya diri anak.

Klaster V: Perlindungan Khusus

Semakin aktif sosialisasi dan edukasi dilakukan maka penyelesaian kasus kekerasan juga diharapkan semakin baik, serta terjadinya penurunan angka kekerasan yang diikuti kesadaran pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam keluarga dan lingkungan bahwa kekerasan yang dilakukan bukan merupakan pola asuh yang tepat.

Kecamatan Layak Anak (KELANA) dan Desa/Kelurahan Layak Anak

Berdasarkan wawancara diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa kecamatan di Kota Pekanbaru sudah ada kesadaran dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak dan sudah semua kecamatan yang dapat dikatakan sebagai kecamatan yang benar-benar layak anak karena desa/kelurahannya sudah layak anak.

***Collaborative Governance* dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru**

Ketersediaan Berkompromi

Ketersediaan berkompromi merupakan elemen penting dalam menciptakan hubungan yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, setiap aktor perlu memiliki fleksibilitas untuk beradaptasi dengan situasi yang ada, membuka diri terhadap solusi alternatif dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dalam menciptakan kerja sama yang efektif. Di Kota Pekanbaru, upaya kompromi terlihat melalui melibatkan pemerintah daerah, swasta, dan media dalam forum musyawarah.

Berkompromi dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru dimana masing-masing menginginkan sesuatu yang berbeda, akan selalu menimbulkan konflik. Masing-masing pihak memiliki kepentingan dan sudut pandang yang berbeda. Pemerintah, misalnya, lebih fokus pada pemenuhan regulasi dan capaian indikator teknis KLA, sementara media massa lebih menyoroti isu kekinian seperti kasus kekerasan terhadap anak. Di sisi lain, sektor swasta cenderung melihat partisipasinya dalam program ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), yang tetap mempertimbangkan aspek citra dan keuntungan. Masyarakat sendiri terkadang mengalami kesulitan dalam memahami konsep KLA secara menyeluruh, atau merasa tidak dilibatkan dalam proses kompromi yang membangun sehingga partisipasi dari masyarakat dalam

berkompromi masih kurang dalam membantu penyelenggaraan program Kota Layak Anak (KLA) khususnya di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan pemaparan di atas, terlihat bahwa pembagian tanggung jawab yang jelas adalah kunci dalam menciptakan kompromi yang efektif. Pembagian yang jelas memastikan setiap pihak tahu peran mereka dalam menyukseskan program KLA, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan. Kejelasan ini juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang merasa diabaikan, serta memperjelas area kontribusi masing-masing pihak dalam mencapai tujuan bersama.

Komunikasi

Komunikasi menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana informasi dapat mengalir dan membentuk interaksi antarindividu, kelompok maupun organisasi. Komunikasi yang baik akan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan terlibat, terinformasi, dan dapat berkoordinasi dengan baik untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, kejelasan dan konsistensi komunikasi antar pemangku kepentingan sangat menentukan sejauh mana implementasi program KLA dapat berjalan dengan efektif.

Pemerintah daerah memainkan peran sentral sebagai inisiator dan fasilitator komunikasi lintas sektor. Bentuk komunikasi yang dilakukan bersifat terbuka dan partisipatif, yang melibatkan berbagai pihak, seperti instansi pemerintah lintas sektor, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, media, hingga masyarakat secara langsung. Pemerintah, melalui forum koordinasi atau pertemuan rutin, mengajak sektor swasta untuk berpartisipasi dalam program perlindungan anak melalui implementasi Corporate Social Responsibility (CSR), seperti pembangunan ruang ramah anak, penyediaan beasiswa, atau pelatihan keterampilan bagi anak dan keluarga rentan. Komunikasi ini biasanya dilakukan melalui MoU atau forum tanggung jawab sosial perusahaan yang difasilitasi pemerintah daerah. Selain itu, media berperan sebagai jembatan komunikasi publik untuk menyebarkan informasi tentang hak-hak anak, program pencegahan kekerasan terhadap anak, serta kampanye edukatif lainnya. Kolaborasi dengan media dilakukan melalui penyediaan ruang publikasi, talkshow, dan media sosial yang mendorong keterlibatan masyarakat.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten antara pemangku kepentingan merupakan kunci keberhasilan dalam penyelenggaraan KLA di Kota Pekanbaru. Meskipun ada upaya yang baik dalam menjaga komunikasi melalui rapat koordinasi dan media sosial, tantangan masih ada dalam hal keterlibatan sektor swasta dan koordinasi dengan media. Untuk meningkatkan efektivitas program KLA, penting bagi pemerintah untuk memastikan adanya saluran komunikasi yang lebih terbuka, konsisten, dan inklusif, yang melibatkan semua pihak terkait, baik sektor publik, swasta, dan media. Koordinasi antar instansi juga harus ditingkatkan agar kebijakan dan program KLA dapat berjalan dengan lebih lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi anak-anak di Kota Pekanbaru.

Komitmen

Komitmen berarti sebagai perjalanan yang mengandung tujuan, nilai-nilai termasuk saling terkait untuk melaksanakan sesuatu sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam hal ini, komitmen tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang diambil, tetapi juga mencakup tingkat keterlibatan aktif setiap pemangku kepentingan serta konsistensi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA oleh semua pihak. Komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program KLA berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak di Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, komitmen tidak hanya berkaitan dengan kebijakan yang diambil, tetapi juga mencakup tingkat keterlibatan aktif setiap pemangku kepentingan serta konsistensi dalam penyelenggaraan kebijakan KLA oleh semua pihak. Komitmen yang kuat dari pemerintah, swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa program KLA berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak di Kota Pekanbaru. Tingkat keterlibatan setiap pihak dalam penyelenggaraan KLA di Kota Pekanbaru terlihat jelas melalui kolaborasi antara berbagai sektor, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat. Kolaborasi yang efektif dapat memastikan bahwa setiap sektor dapat saling mendukung dan melengkapi dalam mencapai tujuan KLA, yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang ramah anak dan mendukung hak-hak anak. Adanya tantangan dalam konsistensi penyelenggaraan kebijakan, terutama terkait dengan kurangnya koordinasi yang berkelanjutan antara sektor-sektor terkait. Komitmen ini menjadi inti dari keberhasilan penyelenggaraan program, karena setiap pihak memahami perannya masing-masing dalam mendukung pencapaian peringkat KLA. Berdasarkan hasil wawancara, keberhasilan komitmen dalam program KLA di Pekanbaru juga didukung oleh mekanisme formal seperti rapat koordinasi, evaluasi rutin, serta keberadaan gugus tugas KLA yang menjadi wadah untuk menyelaraskan strategi di antara para aktor. Namun, dibalik komitmen yang kuat ini, masih terdapat tantangan berupa komunikasi yang efektif, konsisten, dan koordinasi yang efektif. Meskipun ada komitmen di awal, namun tanpa adanya mekanisme koordinasi yang kuat dan pertemuan yang rutin, komitmen tersebut menjadi sulit untuk diwujudkan dalam bentuk implementasi yang konsisten.

Berdasarkan hasil wawancara, keberhasilan komitmen dalam program KLA di Pekanbaru juga didukung oleh mekanisme formal seperti tantangan utama terletak pada bagaimana memastikan konsisten dalam tujuan KLA dapat tercapai dengan maksimal. Rapat koordinasi, evaluasi rutin, serta keberadaan gugus tugas KLA yang menjadi wadah untuk menyelaraskan strategi di antara para aktor. Namun, dibalik komitmen yang kuat ini, masih terdapat tantangan berupa komunikasi yang efektif, konsisten, dan koordinasi yang efektif. Meskipun telah ada deklarasi dan komitmen awal, penyelenggaraan dan komunikasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk terus menjaga dan memperbaiki mekanisme koordinasi.

Saling Percaya

Saling percaya menjadi landasan penting dalam membangun hubungan yang kokoh dan produktif dalam kolaborasi lintas sektor, terutama program-program sosial seperti

Kota Layak Anak (KLA). Rasa saling percaya sangat kuat pengaruhnya dengan timbulnya sinergitas. Sehingga rasa kepercayaan itu sepadan kedudukannya dengan perilaku sebuah sinergi atau kolaborasi. Keyakinan antara pihak-pihak yang berkolaborasi, baik pemerintah, sektor swasta, masyarakat, maupun media, akan memastikan kelancaran pelaksanaan program-program yang mendukung kesejahteraan anak. Tanpa adanya saling percaya, sulit bagi berbagai aktor untuk bekerja bersama-sama mencapai tujuan yang sama. Selain itu, keseriusan setiap pihak dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka juga sangat mempengaruhi keberhasilan program ini. Keyakinan antar pihak yang terlibat dalam program KLA menunjukkan seberapa besar kepercayaan mereka satu sama lain dalam menyukseskan program ini. Keyakinan tersebut tercipta ketika masing-masing pihak memiliki komitmen untuk saling mendukung dan berbagi tujuan yang sama, yaitu menciptakan Kota Pekanbaru yang layak bagi anak-anak.

Wawancara menunjukkan bahwa transparansi dalam pertukaran informasi sudah berjalan namun sudah lama tidak diperbarui. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara dinas terkait dan pihak forum wartawan, di mana terakhir kali itu penyebaran informasi dilakukan pada tahun 2022. Keadaan ini menandakan adanya stagnasi dalam komunikasi publik, yang berdampak serius pada keberhasilan program. Masalah kurangnya koordinasi ini jelas berdampak pada transparansi informasi, karena media sebagai salah satu pilar utama dalam penyebaran informasi ke masyarakat terhambat dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam memberikan pemberitaan mengenai perkembangan KLA, keterbatasan dalam akses terhadap informasi yang valid dan akurat dapat menghambat proses penyampaian informasi yang efektif. Koordinasi yang kurang menyebabkan berita atau informasi terhambat pada aliran informasi yang seharusnya dapat disebarluaskan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai KLA.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwasannya rasa saling percaya ini sudah terbentuk. Hal ini sangat baik, karena saling percaya sangat penting berdampak pada kemampuan bersama untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang dihadapi anak-anak di Pekanbaru. Tanpa kepercayaan, program KLA di Pekanbaru beresiko kehilangan potensi dukungan dari pihak -pihak yang sebenarnya mampu memberikan kontribusi besar.

Transparansi/Pertukaran Informasi

Transparansi merupakan wadah dalam menciptakan asas pertanggungjawaban pemerintah terhadap warganya. Transparansi menjadi tolak ukur kejelasan dalam kolaborasi, terlebih pada pertukaran informasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak sehingga memudahkan untuk melakukan pengawasan dalam setiap kegiatan didalam kolaborasi. Salah satu hal penting dalam melakukan transparansi adalah menerapkan keterbukaan informasi yang jelas dan akurat. Dalam penyelenggaraan program Kota Layak Anak, penyampaian informasi yang akurat juga menjadi hal yang sangat penting. Aktor-aktor yang terlibat, seperti pemerintah, media, dan masyarakat, harus memiliki akses terhadap informasi yang jelas mengenai kebijakan, strategi, serta perkembangan program.

Tanpa informasi yang akurat, maka setiap pihak akan kesulitan dalam melakukan langkah yang tepat untuk mendukung program KLA.

Wawancara menunjukkan bahwa transparansi dalam pertukaran informasi sudah berjalan namun sudah lama tidak diperbarui. Hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara dinas terkait dan pihak forum wartawan, di mana terakhir kali itu penyebaran informasi dilakukan pada tahun 2022. Keadaan ini menandakan adanya stagnasi dalam komunikasi publik, yang berdampak serius pada keberhasilan program. Masalah kurangnya koordinasi ini jelas berdampak pada transparansi informasi, karena media sebagai salah satu pilar utama dalam penyebaran informasi ke masyarakat terhambat dalam melaksanakan tugasnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DP3APM sangat mendukung keterbukaan informasi, sehingga memungkinkan adanya masukan atau umpan balik dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas program KLA. Namun, meskipun ada upaya dari DP3APM untuk membangun keterbukaan, tantangan tetap muncul, terutama dalam hal koordinasi. Transparansi dan pertukaran informasi sangat penting dalam penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA). Pihak pemerintah, media, dan masyarakat harus bekerja sama dengan saling terbuka, baik dalam penyampaian informasi maupun dalam menerima masukan yang konstruktif. Pihak DP3APM telah berupaya melakukan penyampaian informasi melalui berbagai saluran komunikasi yang terbuka, namun kendala koordinasi dengan pihak media menjadi tantangan yang perlu diperbaiki.

Masyarakat juga sangat bergantung pada keberadaan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung keberhasilan program ini. Oleh karena itu, penting bagi pihak-pihak terkait untuk memperkuat transparansi dan memperbaiki mekanisme pertukaran informasi, guna menciptakan aliran informasi yang lebih efektif dalam mendukung program KLA di Pekanbaru.

Berbagi Pengetahuan

Kualitas instansi dan kualitas individu yang tergabung ke dalam kolaborasi menjadi faktor kuat dalam studi berbagi pengetahuan. Pada indikator ini aktor dalam kolaborasi saling berbagi pemikiran yang bermula pada kegiatan berdialog. Dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan tersebut dari ide implisit menjadi ide eksplisit. Karena dengan pengetahuan tersebut, kedua pihak kolaborasi dapat mengungguli pesaing-pesaingnya karena memiliki kemampuan untuk mempelajari pengetahuan baru. Semua pihak menuangkan pemikirannya guna mengoptimalisasikan penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru, supaya manfaat yang dirasakan berdampak besar bagi pemenuhan hak-hak anak.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa DP3APM aktif dalam mengundang berbagai pihak untuk berbagi pengetahuan, baik berupa hasil penelitian terkait kesejahteraan anak maupun pengalaman lapangan terkait pelaksanaan KLA. Melalui kegiatan berbagi pengetahuan ini, diharapkan dapat diperoleh wawasan yang lebih mendalam dan solusi yang lebih tepat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan KLA. Hal ini menunjukkan adanya upaya awal untuk mendorong berbagi pengetahuan di antara aktor-aktor yang

terlibat. Berbagi pengetahuan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik dalam menjadi forum berbagi perspektif dari dinas terkait, pihak swasta, media, dan masyarakat sehingga aktor memiliki pemahaman yang seragam mengenai visi dan misi program.

Adanya upaya awal untuk mendorong berbagi pengetahuan di antara aktor-aktor yang terlibat. Berbagi pengetahuan bukan hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melibatkan pertukaran ide, pengalaman, dan praktik terbaik dapat menjadi forum berbagi perspektif dari dinas terkait, pihak swasta, media, dan masyarakat sehingga aktor memiliki pemahaman yang seragam mengenai visi dan misi program.

Ketersediaan Mengambil Resiko dalam Berkolaborasi

Mengambil risiko adalah bagian integral dari proses kolaborasi, terutama ketika sumber daya terbatas dan kondisi kerja menuntut fleksibilitas. Keberadaan risiko, seperti beban kerja yang berlebihan atau hasil kolaborasi yang tidak sesuai harapan, sering kali memengaruhi motivasi dan komitmen para aktor. Beban kerja yang bertambah akibat kolaborasi sering kali menyebabkan kelelahan kerja, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan efektivitas kolaborasi secara keseluruhan. Namun, teori ini juga menggarisbawahi bahwa risiko dapat menjadi peluang ketika dikelola dengan pendekatan strategis. Ketika aktor-aktor berani menghadapi risiko dan menemukan cara untuk mengatasinya, mereka tidak hanya meningkatkan kemampuan adaptasi, tetapi juga menciptakan inovasi baru yang memperkuat kolaborasi.

Dalam setiap pengambilan keputusan sekecil apa pun sudah pasti terdapat risiko di dalamnya, maka diperlukan kemampuan untuk menganalisis risiko-risiko yang mungkin muncul ketika kolaborasi telah disepakati bersama kemudian dijalankan. Oleh karena itu, kesiapan untuk menghadapi dan mengelola risiko, serta keberanian untuk mencoba pendekatan-pendekatan baru dalam penyelenggaraan KLA, sangat penting untuk memajukan kualitas kehidupan anak di Kota Pekanbaru. Program KLA memerlukan pendekatan baru dalam menghadapi isu yang berhubungan dengan anak. Pendekatan baru ini bisa berupa kebijakan yang lebih inklusif, program berbasis teknologi, atau strategi yang lebih terintegrasi antar sektor yang berbeda. Keberanian untuk mengambil risiko dengan mencoba pendekatan yang belum teruji sebelumnya, meskipun penuh tantangan, dapat membuka peluang baru dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk anak-anak.

Sudah ada pengambilan resiko, penting juga menciptakan budaya organisasi yang mendukung dan menghargai keberanian untuk berinisiatif meskipun dalam kondisi yang sulit. Budaya ini dapat mendorong para aktor untuk tetap terlibat aktif dan mencari solusi kreatif tanpa takut adanya konsekuensi negative. Misalnya pemerintah daerah dapat mengadakan forum diskusi rutin untuk mengevaluasi resiko yang dihadapi dan mencari cara bersama untuk mengatasinya. Selain itu, melibatkan pihak-pihak eksternal, seperti pihak swasta dan media atau sektor swasta, dapat membantu mengurangi beban kerja aktor internal dan menyediakan sumber daya tambahan yang diperlukan.

Kesimpulan

Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Beberapa faktor penting yang menentukan keberhasilan program Kota Layak Anak (KLA) di Pekanbaru termasuk kesiapan untuk berkompromi, saling percaya yang sudah terbangun, sudah saling berbagi pengetahuan, dan kesiapan untuk mengambil risiko dalam berkolaborasi. Namun, *collaborative governance* ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat proses kolaborasi, yaitu komunikasi yang mengalami stagnasi antara pemerintah, media, dan sektor swasta yang sudah lama tidak berjalan, serta komitmen yang ada saling tidak konsisten, terutama dalam koordinasi antar sektor swasta dan media yang menyebabkan penyebaran informasi terhambat. Belum rutinnya pelatihan ataupun forum diskusi juga menyebabkan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program Kota Layak Anak (KLA). Koordinasi yang dilakukan harus lebih intens dengan penguatan komitmen bersama aktor yang terlibat, melalui penandatanganan MoU antar pihak-pihak terkait dan pemberian insentif atau apresiasi bagi pihak yang menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung program KLA serta lebih membangun kedekatan dan mendalamkan kepercayaan dari masyarakat.

Daftar Pustaka

- Alpin, A., Sakti, F. T., & Nur, M. I. (2022). Penguatan Perlindungan Anak Kota Bandung Dalam Perspektif Collaborative Governance. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerinah Daerah*, 4(2), 83-102.
- Amelia, N. S., & Priambodo, B. (2024). Mewujudkan Kota Layak Anak Di Kota Surabaya Melalui Perspektif Collaborative Governance." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 330-344.
- Arrasyid, M. A. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengembangan Objek Wisata Toluk Jangkang Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. *Journal Publicuho*, 4(3), 913–924. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.20209>
- Astuti, R., Warsono, H. dan Rachim, Abd. 2020. Collaborative Governance dalam perspektif Administrasi Publik. Tim DAP Press. Semarang. 164 hlm.
- Choirul, S. 2020. Konsep, pengertian, dan tujuan kolaborasi. *Dapu6107*, 1, 7–8.
- Hardani dkk., 2020. Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Cv. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.
- Haryoko, Sapto, dkk. 2020. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Badan Penerbit UNM. Makassar.
- Hidir, Achmad dan Rahman Malik. 2024. Teori Sosiologi Modern. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah
- Ilosa, A., & Rusdi. (2020). Jurnal Analisis Pelaksanaan Program KLA oleh Ilosa dan Rusdi. *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 87–101.

<http://jmiap.ppj.unp.ac.id>

- Irwan, I., Damanik, E., Melia, Y., Elvawati, E., Jannah, L. I., & Lubis, G. C. (2022). Sosialisasi Penguatan dan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak di Kabupaten Pasaman Barat. *PaKMas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 398–403. <https://doi.org/10.54259/pakmas.v2i2.1243>
- Jehudat, V. K., Novaria, R., & Soesiantoro, A. (2024). COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) DI KOTA SURABAYA. *Journal of Governance and Public Administration*, 1(3), 451-461.
- Lubis, E. F., & Zubaidah, E. (2022). Implementasi Program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Pekanbaru. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 252. <https://doi.org/10.24014/jel.v12i2.14298>
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi) disertai Contoh Proposal*. Yogyakarta: Lemabaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, UPN “Veteran” Yogyakarta Press.
- Noor, Muhammad, Falih Suaedi., A. M. (2022). Collaborative Givernance : Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik. *BILDUNG*.
- Purwanti, N. D. 2016. *Collaborative Governance (Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif : Isu-Isu Kontemporer)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Sari, A. I., & Rusli, Z. (2022). Tata Kelola Pemerintahan Dinamis (Dynamic Governance) Dalam Penyelenggaraan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru. *Saraq Opat: Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 022–032. <https://doi.org/10.55542/saraqopat.v5i1.442>
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung. Alfabeta.
- Swadesi, U., & dkk. (2020). Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak. *Jurnal Administrasi Negara*, 16(1), 77–83. <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7932>
- Wanti Anggrain, N., & Mashur, D. (2022). Collaborative Governance Dinas Sosial Provinsi Riau dalam Menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). *Journal of Social and Policy Issues*, 1, 34–38. <https://doi.org/10.58835/jspi.v2i1.31>